

## PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT UNTUK TIDAK DIPENGARUHI DENGAN IMPIAN BEKERJA DI LUAR NEGERI SEBAGAI TINDAKAN PENANGGULANGAN HUMAN TRAFFICKING STUDI KASUS: DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN

Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>1</sup>, Novridah Reanti purba<sup>2</sup>, Annisa Indriani<sup>3</sup>, Ceri Marsel Tarigan<sup>4</sup>, Devi Rahmi Rizky<sup>5</sup>, Syasya Andini<sup>6</sup>, Venny Juwita Imelia<sup>7</sup>  
Universitas Negeri Medan

Email: [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [novridapurba1@gmail.com](mailto:novridapurba1@gmail.com)<sup>2</sup>, [annisaindriani50@gmail.com](mailto:annisaindriani50@gmail.com)<sup>3</sup>, [cerymarcel40@gmail.com](mailto:cerymarcel40@gmail.com)<sup>4</sup>, [devirahmi21220@gmail.com](mailto:devirahmi21220@gmail.com)<sup>5</sup>, [syasyaandini3@gmail.com](mailto:syasyaandini3@gmail.com)<sup>6</sup>, [vennyjuwita1074@gmail.com](mailto:vennyjuwita1074@gmail.com)<sup>7</sup>

### Abstrak

Human trafficking merupakan masalah hak asasi manusia yang serius di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah impian masyarakat untuk bekerja di luar negeri tanpa memahami risikonya, sehingga memudahkan mereka menjadi korban eksploitasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat, namun upaya yang ada belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya edukasi pemerintah daerah serta faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dokumen, wawancara, dan observasi. Hasil diharapkan memberikan pemahaman strategi edukasi yang efektif agar dapat diterapkan pemerintah daerah untuk mencegah perdagangan manusia. Diharapkan pula penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko perdagangan manusia terkait impian bekerja di luar negeri, sehingga membantu memilih opsi kerja yang aman dan legal.

**Kata Kunci:** Edukasi, Masyarakat, Human Trafficking.

### ABSTRACT

*Human trafficking is a serious human rights issue in Indonesia. One of the causes is the desire of the population to work abroad without understanding the risks involved, thus making them vulnerable to exploitation. Local governments play a crucial role in educating the public, yet existing efforts have not been fully maximized. This research aims to analyze the educational efforts of local governments and the factors influencing them. A qualitative descriptive research method will be employed, utilizing document analysis, interviews, and observations as data collection methods. The expected outcome is to provide an understanding of effective educational strategies that local governments can implement to prevent human trafficking. Additionally, it is hoped that this research will increase public awareness of the risks of human trafficking associated with the aspiration to work abroad, thereby assisting individuals in choosing safe and legal employment options.*

**Keywords:** Education, Community, Human Trafficking.

## A. PENDAHULUAN

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan masalah serius yang merugikan masyarakat secara global. Indonesia sebagai negara dengan jumlah kasus human trafficking yang cukup signifikan, terutama dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi pekerjaan di luar negeri, memerlukan upaya konkret untuk menanggulangi fenomena ini. Salah satu faktor pendorong yang menjadi penyebab terjadinya human trafficking adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko dan konsekuensi dari impian bekerja di luar negeri.

Trafficking atau Perdagangan Manusia merupakan masalah sosial yang serius yang telah mendapat perhatian global. Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan banyak negara tujuan kerja TKI menghadapi tantangan besar untuk mencegah kasus human trafficking. Menurut data Kemnaker, jumlah TKI Indonesia di luar negeri mencapai lebih dari 2,5 juta orang yang sebagian besar bekerja di sektor domestik dan konstruksi. Sayangnya banyak di antara TKI menjadi korban perdagangan manusia dan berbagai bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan.

Salah satu penyebab terjadinya Human Trafficking adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap resiko bekerja di luar negeri. Banyak masyarakat yang tergiur dengan impian bekerja di luar negeri tanpa memahami mekanisme perekrutan dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Kurangnya edukasi membuat mereka mudah dimanipulasi pelaku human trafficking. Di sisi lain, tingginya tingkat kelaparan akan pekerjaan dan pendapatan membuat masyarakat rentan menjadi korban.

Siddharth Kara Seorang peneliti senior di Carr Center for Human Rights Policy di Harvard Kennedy School, Kara mengungkapkan bahwa human trafficking merupakan salah satu bisnis ilegal terbesar di dunia, dengan perkiraan keuntungan tahunan mencapai miliaran dolar. Human trafficking merupakan salah satu fenomena global yang merajalela dan telah menjadi perhatian utama dalam agenda hak asasi manusia. Siddharth Kara, menjelaskan bahwa perdagangan manusia merupakan bisnis ilegal yang menghasilkan keuntungan besar bagi para pelaku dengan memanfaatkan kerentanan individu yang rentan. Fenomena ini tidak hanya mencakup eksploitasi seksual, tetapi juga melibatkan eksploitasi buruh, perdagangan organ tubuh, dan bahkan perdagangan anak. Kara menyoroti bahwa human trafficking adalah bisnis yang sangat menguntungkan, dengan perkiraan keuntungan global yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan pemerintah untuk menegakkan hukum secara efektif, korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik bersenjata yang menciptakan kondisi yang memperburuk kerentanan individu terhadap eksploitasi.

Dr. Agnes Widyaningrum, seorang peneliti yang memfokuskan perhatiannya pada isu-isu sosial dan kesejahteraan, telah menyoroti pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam penanggulangan human trafficking. Pendapat beliau menggarisbawahi bahwa upaya penanggulangan human trafficking perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Peran pemerintah daerah Kota Medan sangat krusial dalam upaya menghadapi dan mengatasi permasalahan ini. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dan memastikan bahwa hak-hak dasar manusia dihormati dan dilindungi. Selain itu, perdagangan manusia sering kali terjadi lintas negara, melibatkan jaringan yang kompleks dari para pelaku yang bekerja sama lintas batas. Jaringan ini terdiri dari para perekrut, penyelundup, pengusaha ilegal, dan bahkan petugas pemerintah yang korup. Dalam konteks ini, upaya penanggulangan human trafficking memerlukan kerja sama internasional yang kuat dan koordinasi yang efektif antara negara-negara. Tingginya tingkat kerentanan individu terhadap eksploitasi dalam perdagangan manusia menunjukkan perlunya upaya pencegahan

yang lebih luas dan pendekatan holistik dalam menanggulangi fenomena ini.

Pendekatan ini didasarkan pada pengakuan akan peran penting masyarakat dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan kasus-kasus human trafficking. Masyarakat, sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitarnya, memiliki pengetahuan lokal yang dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola eksploitasi dan perilaku mencurigakan yang terkait dengan perdagangan manusia.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya human trafficking dan pentingnya memilih jalur migrasi yang aman dan legal. Namun, masih terdapat kekurangan dalam upaya penyuluhan dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan impian bekerja di luar negeri sebagai tindakan konkrit dalam penanggulangan human trafficking. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang strategi yang efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, diharapkan dapat dikembangkan langkah-langkah lebih lanjut dalam menanggulangi perdagangan manusia di tingkat lokal dan nasional.

## **B. METODE**

Untuk menjalankan penelitian dengan akurat, penting untuk memilih metode penelitian yang sistematis. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dianggap valid, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang mana melibatkan pengumpulan informasi dari sasaran atau subjek penelitian, yang sering disebut sebagai informan atau responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dapat berupa wawancara, observasi, dan sebagainya (Arikunto, 1998:130). Penelitian dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang berada di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 14, Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

Dilihat dari cara pengumpulan data, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, bukan angka, dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Moleong, 2006: 6). Penelitian kualitatif merumuskan masalah secara induktif berdasarkan data lapangan, dan tidak terikat pada variabel dan teori.

### **2. Populasi**

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi tidak selalu digunakan seperti dalam penelitian kuantitatif. Namun, jika kita merujuk pada konsep populasi dalam arti luas, populasi dalam penelitian ini dapat dipandang sebagai semua individu atau kelompok yang relevan dengan topik penelitian ini. Dalam konteks ini, populasi mungkin mencakup masyarakat di daerah tertentu yang berpotensi menjadi korban human trafficking atau yang memiliki anggota keluarga yang bekerja di luar negeri, serta pemerintahan yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang berada di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 14, Merdeka, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

### **3. Sampel**

Dalam penelitian kualitatif, penggunaan sampel lebih berkaitan dengan pemilihan kasus atau partisipan yang memiliki informasi dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Sampel dalam penelitian ini mungkin terdiri dari 2 orang Pejabat atau Staf dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan.

### **4. Instrument Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri

(Licoln and Guba, 1986).

## 5. Subjek Penelitian

Pejabat dan staf Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang terlibat dalam program edukasi.

## 6. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode wawancara/interview

Metode wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan pihak terkait, seperti pejabat atau staf Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang terlibat dalam program edukasi terkait human trafficking. Wawancara digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi, pendekatan, dan kendala yang dihadapi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko bekerja di luar negeri terkait human trafficking.

### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data dari berbagai dokumen yang relevan dengan peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah pengaruh impian bekerja di luar negeri terhadap human trafficking. Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan termasuk kebijakan pemerintah, program edukasi yang telah dilaksanakan, laporan aktivitas, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan human trafficking oleh Dinas Ketenagakerjaan.

### c. Observasi

Metode observasi dalam penelitian ini mencakup pengamatan langsung terhadap kegiatan atau program edukasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan terkait pencegahan human trafficking. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana program tersebut dijalankan, interaksi antara penyelenggara dengan masyarakat, serta respons masyarakat terhadap edukasi yang diberikan.

## 7. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana metode kualitatif adalah metode yang digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka dari orang-orang dan pelaku yang diamati (Moleong, 2006:6).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, diuraikan mengenai hasil observasi, hasil wawancara, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yaitu Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Tidak Dipengaruhi Dengan Impian Bekerja DiLuar Negeri Sebagai Tindakan Penanggulangan Human Trafficking Studi kasus: Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Penelitian ini dilakukan di kota Medan dengan mencari informan yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini.

Dalam mencari dan mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan studi pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan informasi mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Tidak Dipengaruhi Dengan Impian Bekerja DiLuar Negeri Sebagai Tindakan Penanggulangan Human Trafficking.

Pada tahapan Analisa yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk wawancara kepada para informan sebagai pengumpulan data, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana informasi yang diberikan oleh informan, penelitian melakukan beberapa tahapan yaitu wawancara berdasarkan fokus penelitian

mengenai upaya pemerintah daerah dan lembaga terkait di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, dalam mengatasi masalah human trafficking, strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah Sumatera Utara, peran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam memberikan edukasi untuk mencegah human trafficking, Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam memerangi human trafficking.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Mei 2024, hasil penelitian diperoleh dengan cara wawancara yang mendalam dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data dan terlibat langsung dilapangan yang kemudian peneliti Analisa, berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan oleh penelitian:

Tabel 1.

Jadwal Wawancara Informan Kunci

Nama Informan	Tanggal	Waktu	Tempat Wawancara
<b>Hadeli Sundhana</b>	1 Mei 2024	13.30	Kantor Dinas Ketenagakerjaan

Sumber: Peneliti 2019

Tabel 2.

Jadwal Wawancara Informan Pendukung

Nama Informan	Tanggal	Waktu	Tempat Wawancara
<b>Elly Yosa</b>	1 Mei 2024	13.30	Kantor Dinas Ketenagakerjaan

Sumber: Peneliti 2019

#### a. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian ini menyangkut tentang Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Tidak Dipengaruhi Dengan Impian Bekerja DiLuar Negeri Sebagai Tindakan Penanggulangan Human Trafficking. Aspek-aspek yang diamati berupa strategi, peran dan Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dalam menangani kasus Human Trafficking.

##### 1. Sejarah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan pengaturan dan peningkatan kondisi ketenagakerjaan di kota Medan yang berkembang pesat sebagai pusat ekonomi dan industri di Sumatera Utara. Sejarahnya dimulai pada masa kolonial, dengan fokus pada pengelolaan tenaga kerja di perusahaan perkebunan dan perdagangan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk struktur pemerintahan untuk menangani isu-isu ketenagakerjaan, yang kemudian berkembang menjadi Dinas Tenaga Kerja Kota Medan. Dalam perkembangannya, dinas ini mengalami transformasi dengan mengadopsi teknologi dan digitalisasi layanan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Fungsi utama Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mencakup pengaturan dan pengawasan hubungan industrial, pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja, penempatan kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Beberapa program utama yang dijalankan antara lain program pelatihan kerja, bursa kerja, dan pendampingan UMKM. Sejarah dinas ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Medan.

##### 2. Visi dan Misi Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan

Visi:

Mewujudkan tenaga kerja berkualitas dan bertanggung jawab untuk mendukung perekonomian Kota Medan

Misi:

1. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan kebutuhan pasar
3. Membina hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja
4. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja dan pelaku usaha
5. Mewujudkan industri yang sehat dan menjunjung tinggi hak-hak pekerja
6. Mengatasi perselisihan hubungan industrial secara bijak dan adil
7. Mendorong kesetaraan upah antar jenis pekerjaan dan industri di Kota Medan

b. Deskripsi Profile Informan

Infoman pada penelitian ini berjumlah 2 orang dengan 1 orang informan kunci yaitu Katim penempatan pekerjaan dalam dan luar negeri. Serta 1 orang informan pendukung yaitu Pengantar kerja divisi penempatan luar negeri, yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh dilapangan keseluruhan 69 pemilihan informan tersebut dipilih dengan pertimbangan tertentu, dikarenakan menurut penelitian orang tersebut yang paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan dalam penelitian ini.

1. Informan Kunci

Hadeli Sundhana



Bapak Hadeli Sundhana ini menjabat sebagai Katim penempatan pekerjaan dalam dan luar negeri. Beliau adalah orang yang sangat penting di Dinas Ketenagakerjaan Sebagai Ketua Tim (Katim) Penempatan Pekerjaan dalam dan luar negeri, tugas utamanya mencakup merencanakan dan mengkoordinasikan strategi penempatan, mengidentifikasi dan merekrut calon tenaga kerja, serta mengelola administrasi dan dokumentasi penempatan. Katim juga bertanggung jawab menyusun program pelatihan dan mengevaluasi kinerja tenaga kerja yang ditempatkan, memantau kondisi mereka, serta mengatasi masalah yang muncul. Selain itu, Katim menjaga hubungan baik dengan mitra kerja dan pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan analisis pasar kerja dan menerapkan inovasi untuk meningkatkan efektivitas penempatan.

2. Informan Pendukung

Elly Yosa



Ibu Elly Yosa merupakan Informan pendukung dalam penelitian ini, karena beliau adalah salah satu staf yang bertugas sebagai Pengantar kerja divisi penempatan luar negeri.

c. Analisis Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara secara mendalam yang telah dilakukan peneliti kepada informan ketika melakukan penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Tidak Dipengaruhi Dengan Impian Bekerja DiLuar Negeri Sebagai Tindakan Penanggulangan Human Trafficking. Dalam melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan, maka peneliti melakukannya berdasarkan lokasi serta waktu yang sudah diatur sebaik mungkin. Selain itu peneliti bertemu langsung dengan informan.

Hasil penelitian ini diperoleh melalui Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, Teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang alamiah, struktur wawancara yang peneliti rancang bukan merupakan pedoman yang baku, jadi apabila jawaban yang diberikan informan kurang jelas, maka peneliti mengajukan pertanyaan lain agar jawaban yang diberikan bisa lebih jauh saat mereka menjabarkan, maka peneliti dapat menganalisa Peranan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Untuk Tidak Dipengaruhi Dengan Impian Bekerja DiLuar Negeri Sebagai Tindakan Penanggulangan Human Trafficking meliputi:

1. Upaya Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam mengatasi masalah Human Trafficking

Pemerintah daerah menghadapi masalah human trafficking dengan berbagai strategi. Mereka meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye dan pendidikan di sekolah, serta memperkuat hukum dan kebijakan dengan peraturan daerah dan penegakan hukum yang lebih tegas. Kerjasama lintas sektor dengan kepolisian, LSM, dan organisasi internasional juga diperkuat. Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui pelatihan kerja dan dukungan usaha kecil untuk mengurangi risiko kelompok rentan menjadi korban. Untuk perlindungan korban, disediakan tempat penampungan, layanan kesehatan, dan program reintegrasi sosial. Pengumpulan data dan analisis dilakukan untuk memantau kasus dan memahami tren human trafficking. Pengawasan ditingkatkan di area rawan dan perusahaan rekrutmen diawasi untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam praktik ini. Strategi-strategi ini membantu pemerintah daerah mencegah dan menanggulangi human trafficking dengan lebih efektif. Maka strategi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan kunci

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana cara dinas ketenagakerjaan menyebar luaskan informasi edukasi kepada	Dinas Ketenagakerjaan menyebarluaskan informasi melalui kepala lingkungan di kota Medan dan memberikan sosialisasi kepada

Masyarakat?	mereka. Tujuannya adalah agar masyarakat Medan tidak terpengaruh oleh tawaran agen ilegal. Kami menyampaikan bahwa jika ingin bekerja di luar negeri, sebaiknya melalui Dinas Ketenagakerjaan, sehingga kami dapat mengarahkan mereka ke perusahaan-perusahaan yang resmi menerima pekerja migran. Selain itu, kami juga menyebarkan informasi edukasi melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook.
Bagaimana cara dinas ketenagakerjaan memantau program edukasi yang sudah berjalan?	Kami mengamati jumlah pekerja migran ilegal yang kembali setiap tahun, baik sebelum maupun setelah kami melakukan sosialisasi. Kami membandingkan pengurangan jumlah pekerja migran ilegal setelah sosialisasi tersebut. Jika tidak ada pengurangan, kami akan segera mengevaluasi program edukasi yang telah kami jalankan. Setiap tahun, ada pekerja migran ilegal yang dideportasi dan dikembalikan ke negara asal, termasuk dalam kategori pekerja migran bermasalah. Pada saat itu, kami bisa membandingkan apakah jumlahnya meningkat atau menurun, sehingga kami dapat memantau efektivitas program edukasi yang kami berikan dan segera melakukan evaluasi jika diperlukan.
Apa tantangan yang dihadapi dinas ketenagakerjaan dalam menyebarluaskan edukasi kepada Masyarakat?	Tantangan yang kami hadapi sebenarnya hanya sedikit, karena kami menyebarkan informasi melalui sosialisasi. Namun, tantangan terbesar adalah masyarakat lebih percaya kepada agen ilegal daripada pihak

	pemerintah. Banyak masyarakat tergiur dengan proses yang cepat dan persyaratan yang sedikit yang ditawarkan oleh agen ilegal.
--	---

Tabel 2. Informan Pendukung

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana cara dinas ketenagakerjaan menyebar luaskan informasi edukasi kepada Masyarakat?	Kami dinas ketenagakerjaan menyebarluaskan melalui kepala lingkungan dan kami memberikan sosialisasi kepada setiap kepala lingkungan yang ada dikota medan bahwasanya agar masyarakat kota medan jangan udah terpengaruh dengan iming-imingan agen ilegal, dan menyampaikan informasi jika memang ingin bekerja di luar negeri hanya melalui dinas ketenagakerjaan agar kami mengarahkan Dimana Perusahaan-perusahaan yang memang menerima pekerja migran di luar negeri. Kami juga menyebarluaskan informasi edukasi melalui social media yaitu Instagram dan facebook.
Bagaimana cara dinas ketenagakerjaan memantau program edukasi yang sudah berjalan?	Kami melihat dari tahun sebelum berapa pekerja migran ilegal yang Kembali pada saat kami sebelum dan sesudah melakukan sosialisasi berapa pengurangan yang terjadi pada saat setelah ada nya sosialisasi jika tidak ada pengurangan kami akan segera melakukan evaluasi pada program edukasi yang telah kami lakukan sebelumnya. Karena pada setiap tahun nya pasti ada pekerja migran ilegal yang di deportasi dari luar negeri di kembalikan ke negeri asal dan mereka termasuk kepada pekerja migran

	bermasalah (illegal) dan pada saat itulah kami bisa membandingkan apakah jumlahnya meningkat atau menurun sehingga kami dapat memantau program edukasi yang kami berikan dan bisa segera kami evaluasi.
Apa tantangan yang dihadapi dinas ketenagakerjaan dalam menyebarluaskan edukasi kepada Masyarakat?	Tantangan yang kami hadapi sebenarnya hanya sedikit, karena kami menyebarkan informasi melalui sosialisasi. Namun, tantangan terbesar adalah masyarakat lebih percaya kepada agen ilegal daripada pihak pemerintah. Banyak masyarakat tergiur dengan proses yang cepat dan persyaratan yang sedikit yang ditawarkan oleh agen ilegal.

Berdasarkan dari pemaparan informan kunci dan informan pendukung di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berkomitmen untuk meningkatkan penyebaran informasi edukasi kepada masyarakat. Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah meningkatkan akses informasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Intensitas sosial media seperti Instagram dan Facebook akan ditingkatkan untuk menyampaikan berbagai informasi secara real time.

Strategi lainnya adalah melakukan sosialisasi secara terarah ke tingkat RT/RW dengan bantuan kepala lingkungan. Jadwal sosialisasi akan disusun secara terpadu dan terstruktur. Lembaga-lembaga masyarakat turut diikutsertakan untuk turut serta menyebarluaskan informasi di lingkup mereka. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran informasi.

Selain itu, Dinas akan memperkuat kredibilitasnya sebagai sumber informasi resmi dengan menjaga komunikasi yang konsisten dan responsif. Hubungan sinergis dengan instansi terkait juga akan ditingkatkan untuk mendukung penyebaran informasi. Evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengukur pemahaman masyarakat serta merespons tantangan yang muncul guna perbaikan berkelanjutan. Dengan berbagai strategi tersebut, diharapkan penyebaran informasi edukasi dapat lebih optimal.

Tantangan utama yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dalam menyebarluaskan informasi edukasi kepada masyarakat adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak pemerintah. Masyarakat cenderung lebih mempercayai tawaran agen-agen ilegal yang dinilai lebih cepat dan mudah dalam proses perekrutan tenaga kerja. Padahal, pihak dinas berupaya memberikan informasi yang benar dan mengarahkan masyarakat pada jalur perekrutan resmi yang dapat menjamin hak-hak dan keselamatan pekerja migran.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi juga menjadi kendala tersendiri. Walaupun sudah berupaya menggunakan sosialisasi melalui kepala lingkungan dan media sosial, namun jangkauannya masih terbatas. Belum optimalnya penggunaan teknologi komunikasi juga masih menjadi perhatian.

Dari sisi SDM, kurangnya jumlah personel yang terlibat langsung dalam sosialisasi juga

menjadi masalah. Padahal wilayah kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan cukup luas dengan jumlah masyarakat yang harus dicapai.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penguatan sosialisasi secara terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perlu pula optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam menyebarluaskan informasi edukasi.

2. Strategi yang digunakan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Dalam Memberikan Edukasi Dalam Pencegahan Human Trafficking

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi untuk mencegah human trafficking. Melalui program edukasi, mereka bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko human trafficking dan pentingnya menggunakan jalur legal dalam mencari pekerjaan di luar negeri. Maka strategi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan kunci

Pertanyaan	Jawaban
Apa strategi yang dilakukan dinas ketenagakerjaan dalam menghadapi human trafficking?	Kami berupaya mempermudah persyaratan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) dan memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan dan keahlian. Edukasi ini bertujuan agar mereka memahami jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan di tempat penempatan kerja. Kami menjelaskan tentang berbagai jenis pekerjaan di luar negeri, seperti pekerjaan bangunan, operator, atau pertanian, sehingga calon PMI mengetahui apa yang akan mereka lakukan, berapa gaji yang ditawarkan, dan bagaimana alur bekerja di luar negeri. Edukasi ini juga bertujuan agar mereka tidak tertarik dengan agen ilegal yang menawarkan gaji besar dan proses perekrutan yang cepat. Agen ilegal sering kali menimbulkan masalah seperti human trafficking, karena proses legal memiliki tahapan yang sedikit lebih lama. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, kami berharap calon PMI lebih memilih jalur resmi dan terhindar dari risiko yang ditawarkan oleh agen ilegal.

<p>Target apa saja yang dijangkau pada edukasi dilakukan?</p>	<p>Target kami adalah mengurangi kasus human trafficking, khususnya di kalangan warga Kota Medan, sehingga tidak ada penambahan kasus setiap tahunnya. Kami menyadari bahwa banyak warga tergiur dengan iming-iming gaji besar, penempatan yang bagus, dan proses yang cepat, yang sering kali menjadi korban human trafficking. Untuk mencapai target ini, kami fokus pada pendekatan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan menggunakan jasa agen ilegal. Kami juga meningkatkan akses dan informasi mengenai prosedur legal untuk bekerja di luar negeri melalui berbagai saluran komunikasi, seperti sosialisasi, media sosial, dan kampanye publik. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya human trafficking dan memberikan alternatif yang aman dan legal, kami berharap dapat mengurangi kasus human trafficking di Kota Medan dan melindungi masyarakat dari ancaman tersebut.</p>
---	--

Tabel 2. Informan Pendukung

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apa strategi yang dilakukan dinas ketenagakerjaan dalam menghadapi human trafficking?</p>	<p>Mempermudah syarat-syarat yang akan dilalui oleh para calon pmi dan memberikan edukasi bahwa pendidikan dan keahlian itu harus diberikan kepada mereka agar mereka mengetahui apa jenis pekerja apa yang akan mereka keejakan ditempat penempatan kerja. Edukasi yang diberikan kepada calon migran Indonesia, biasanya kita menjelaskan tentang</p>

	pekerjaan yang ada di luar negeri misalnya pekerjaan bangunan, operator atau pertanian agar mereka paham apa yang akan mereka lakukan disana dan dengan gaji yang ditawarkan berapa dan bagaimana alur bekerja diluar negri agar mereka tidak tertarik dengan agen yang menawarkan gaji yang besar, proses perekrutan yang cepat hal ini berbeda dengan yang legal yaitu memiliki proses yang sedikit lebih lama sehingga banyak orang yang tergiur dengan agen yang tidak legal sehingga terjadi human trafficking.
Target apa saja yang dijangkau pada edukasi dilakukan?	Target nya mengurangi human trafficking khususnya pada warga kota medan agar jangan ada lagi penambaha kasus human trafficking setiap tahun nya pada warga kota medan. Karna banyak warga yang tergiur dengan iming-iming gaji yang besar, penempatan yang bagus dan proses yang cepat sehingga masi ada warga yang menjadi korban human trafficking.

Berdasarkan dari pemaparan informan kunci dan informan pendukung di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan berkomitmen untuk mencapai target mengurangi kasus human trafficking di kalangan warga kota. Hal ini penting mengingat banyaknya warga yang menjadi korban akibat tergiur tawaran agen-agen ilegal yang tidak sesuai fakta. Untuk itu, dinas melakukan berbagai upaya edukasi untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah memberikan informasi secara jelas dan akurat mengenai prosedur perekrutan pekerja migran yang legal. Calon pekerja migran diberikan pemahaman mengenai berbagai pilihan pekerjaan, persyaratan, gaji, dan mekanisme kerja di luar negeri. Hal ini bertujuan agar mereka tidak keliru dalam memilih agen. Selain itu, dinas juga mempermudah persyaratan bagi calon pekerja untuk mengurangi kecenderungan pilih jalur ilegal.

Edukasi dan sosialisasi juga diarahkan ke masyarakat luas melalui berbagai saluran. Dinas melakukan sosialisasi secara langsung di RT/RW setempat dengan memberikan pengarahan dan bahan informasi. Media sosial juga dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan dapat mengurangi angka korban human trafficking dari warga Kota Medan.

3. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam memerangi Human Trafficking.

Dinas Tenaga Kerja aktif dalam upaya penegakan hukum untuk memerangi human trafficking. Mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus-kasus human trafficking yang melibatkan pekerja migran. Selain itu, mereka memberikan informasi dan dukungan kepada korban yang terlibat, serta membantu proses penanganan hukum terhadap pelaku kejahatan. Dengan melibatkan diri dalam penegakan hukum, Dinas Tenaga Kerja berperan penting dalam memberantas praktik human trafficking dan melindungi hak-hak pekerja migran. Maka Upaya penegakan hukum yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan kunci

Pertanyaan	Jawaban
Apa resiko yang biasa di hadapi oleh pekerja migran?	Resiko yang seringkali dihadapi oleh para pekerja migran adalah ancaman terhadap nyawa mereka. Kasus-kasus kematian pekerja migran sering terjadi, terutama di negara-negara seperti Kamboja. Banyak dari mereka yang meninggal dengan alasan yang bervariasi. Namun, yang menjadi sorotan adalah bahwa kasus-kasus ini umumnya melibatkan pekerja migran ilegal, dengan sedikit kasus yang melibatkan pekerja migran yang bekerja secara legal. Selain itu, kasus kekerasan juga sering dialami oleh pekerja migran, terutama di Kamboja. Hal ini disebabkan karena Kamboja bukan merupakan negara penempatan pekerja migran secara resmi, sehingga pekerja migran yang berada di sana cenderung bekerja secara ilegal dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
Apakah ada instansi yang terkait dengan dinas ketengakerjaan dalam menangani kasus human trafficking?	Dalam tim satgas kami, terdapat berbagai lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, Imigrasi, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Balai Pelayanan

	<p>Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), dan Dinas Sosial. Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Ketika terjadi masalah terkait pekerja migran ilegal, koordinasi dilakukan dengan tiap tim terkait. Misalnya, jika pekerja migran ilegal yang dideportasi tidak memiliki keluarga untuk ditampung, kami akan menyerahkan kasus tersebut kepada Dinas Sosial. Begitu pula jika ada pekerja migran yang pulang karena sakit, tanggung jawabnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Dengan demikian, masing-masing instansi memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dalam penanganan masalah terkait pekerja migran.</p>
<p>Upaya penegakan hukum yang dilakukan dinas ketenagakerjaan pada korban atau pelaku human trafficking?</p>	<p>Dalam upaya penegakan hukum, kami bekerja sama dengan pihak berwajib, terutama kepolisian. Kami mendampingi proses yang akan dilalui dan memberikan informasi yang kami miliki untuk membantu dalam penyelidikan. Kami juga aktif bertanya tentang cara para pelaku mendapatkan korban untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, kami juga terlibat dalam penanganan korban. Kami mendampingi korban dan menyerahkan mereka kepada pihak yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Dinas Sosial, dan lembaga lainnya. Jika korban tidak memiliki masalah yang serius, kami langsung mengembalikan</p>

	<p>mereka kepada keluarga mereka untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, kami berupaya untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan para pelaku ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.</p>
--	---

Tabel 2. Informan Pendukung

Pertanyaan	Jawaban
<p>Apa resiko yang biasa di hadapi oleh pekerja migran?</p>	<p>Resiko yang sering sekali adalah nyawa yang terancam, sering sekali kami mendapatkan kasus pekerja migran yang Kembali sudah tidak bernyawa contohnya seperti pekerja migran yang bertempat di kamboja, banyak sekali dari mereka meninggal dengan alasan yang bermacam-macam, pada umumnya pekerja yang bermasalah itu datangnya dari pekerja migran yang illegal karena jarang sekali kami mendapati kasus-kasus dari pekerja migran yang legal. Banyak juga kasus kekerasan yang di dapatkan dari pekerja migran dan kasus paling banyak terjadi adalah pekerja migran yang bertempat di kamboja alasan nya adalah karena sebetulnya kamboja bukan merupakan negara penempatan pekerja migran yang berarti pekerja migran yang berada disana adalah pekerja migran illegal sehingga banyak terjadi kasus-kasus kekerasan.</p>
<p>Apakah ada instansi yang terkait dengan dinas ketengakerjaan dalam menangani kasus human</p>	<p>Di dalam tim satgas kami yang terkait ada Dinas Kesehatan, Kepolisian, Imigrasi Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Balai</p>

trafficking?	Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Dinas Sosial. Disini jika terjadi masalah-masalah kami mengkoordinasi dengan tiap tim terkait missal seperti pekerja migran illegal yang di deportasi tetapi dia tidak memiliki keluarga untuk menampung maka kami menyerahkan ke Dinas social atau jika ada pekerja migran yang pulang karena sakit maka kami serahkan kepada dinas Kesehatan. Jadi masing-masing instansi memiliki tugas atau pekerjaan nya masing-masing.
Upaya penegakan hukum yang dilakukan dinas ketenagakerjaan pada korban atau pelaku human trafficking?	Untuk Upaya penegakan hukum kami memberikan kepada pihak berwajib atau kepada kepolisian kami hanya mendampingi proses yang akan dilalui serta kami akan menanyakan bagaimana cara para pelaku mendapatkan korban dan untuk penanganan korban juga kami mendampingi dan menyerahkan korban kepada pihak-pihak yang sesuai dengan kebutuhan korban seperti dinas perlindungan anak dan Perempuan, dinas sosial dan lain sebagainya dan jika korban yang Kembali tidak memiliki masalah maka kami langsung mengembalikan korban kepada pihak keluarga.

Berdasarkan dari pemaparan informan kunci dan informan pendukung di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dalam upaya penegakan hukum atas kasus human trafficking, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Untuk tindakan hukum terhadap pelaku, dinas memberikan dukungan kepada kepolisian dengan hadir sebagai narasumber dan mendampingi proses investigasi. Dinas juga aktif memberikan pertanyaan untuk membantu mengungkap cara kerja para pelaku.

Dinas Ketenagakerjaan tidak hanya berkoordinasi dengan instansi terkait dalam tahap investigasi dan pemulihan korban, namun juga terlibat dalam upaya preventif. Dalam kerangka ini, dinas giat melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat mengenai modus operasi pemodal ilegal dan risiko yang ditimbulkan. Sosialisasi dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait

seperti kepolisian dan BP3TKI.

Edukasi juga difokuskan kepada kelompok rentan seperti pelajar dan calon pekerja migran. Materi penyuluhan dikemas secara komunikatif agar pesan-pesan pencegahan dapat tertanam dengan baik. Dinas juga mengirimkan petugas khusus untuk melakukan kampanye di sekolah dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, dinas turut berperan memantau agen-agen penempatan kerja untuk memastikan standar operasionalnya sesuai prosedur. Kerja sama dengan asosiasi tenaga kerja turut dimanfaatkan. Apabila ditemukan pelanggaran, dinas menindaklanjuti dengan melaporkan kasus ke instansi terkait.

Dengan pendekatan multidimensi melalui pencegahan, pemulihan, hingga penegakan hukum, diharapkan upaya dinas dapat menekan angka korban human trafficking secara berkelanjutan di Kota Medan. Kolaborasi dengan berbagai pihak juga dipastikan berjalan efektif.

Sementara itu, untuk penanganan korban, dinas memastikan korban mendapat perlakuan yang sesuai. Apabila diketahui keadaan korban membutuhkan perlindungan khusus, dinas akan menyerahkan korban kepada instansi terkait seperti Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak atau Dinas Sosial. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi.

Dinas juga turut serta dalam pengembalian korban ke keluarga masing-masing. Apabila setelah diperiksa kesehatan dan kondisi psikologisnya tidak membutuhkan perawatan lebih lanjut, korban langsung dikembalikan ke keluarganya. Dengan demikian, dinas berupaya memastikan para pelaku dijerat hukum dan korban mendapat perlindungan yang layak. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.

#### **D. KESIMPULAN**

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus human trafficking. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melakukan berbagai upaya dalam penyebaran informasi edukasi kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain melalui sosialisasi kepada kepala lingkungan di seluruh wilayah Kota Medan guna menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyebaran informasi edukasi juga dilakukan secara online melalui media sosial.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan juga terus memantau efektivitas program edukasi yang telah dilakukan dengan membandingkan jumlah kasus human trafficking sebelum dan sesudah sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat akan bahaya tindakan human trafficking serta mengevaluasi program jika diperlukan perbaikan. Strategi yang digunakan dalam memberikan edukasi pencegahan human trafficking meliputi memberikan informasi jelas mengenai prosedur perekrutan pekerja migran secara legal dan mempermudah persyaratan bagi calon pekerja. Tujuan utama edukasi ini adalah mengurangi jumlah kasus human trafficking di Kota Medan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah berupaya membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya tindakan human trafficking melalui berbagai program edukasi.

Dinas Ketenagakerjaan juga menerapkan beragam strategi dalam memberikan edukasi pencegahan human trafficking. Strategi utama adalah memberikan informasi secara jelas dan transparan mengenai prosedur perekrutan pekerja migran secara legal serta mempermudah persyaratan bagi calon pekerja. Tujuannya agar masyarakat tidak tertarik menggunakan jasa agen ilegal yang dapat menimbulkan risiko seperti human trafficking. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan juga turut serta dalam penegakan hukum dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus-kasus human trafficking yang terjadi. Dengan berbagai upaya, strategi dan penegakan hukum yang dilakukan, diharapkan dapat

menekan angka kasus human trafficking di Kota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Prakoso et al., (2018) “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Jurnal Fakultas Hukum UNNES, Volume 4, No. 1.
- Alfian, A. (2015). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Jurnal Ilmu Hukum, 331-339
- Brian Septiadi Daud, d. (2019). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 352-365.
- Djohan, G., & Burhani, H. M. A. (2023). Peran Pemerintah Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang Dalam Menangani Kasus Human Trafficking (Prostitusi) di Desa Karang Serang. Jurnal Politik Walisongo, 5(1), 17-38.
- Jacobs, B. N. (2023). Peran Pemerintah Dalam Preindungan Hak Korban Human Trafficking Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Johan Silalah, d. (2018) UPAYA KEPOLISIAN DI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA) Jurnal Hukum, 99-111
- Kusumawardhani.D.T.P.(2010). PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEREMPUAN YANG BERORIENTASI PERLINDUNGAN KORBAN.Jurnal masyarakat dan budaya.12.331-362
- Minin, H. D (2011) STRATEGI PENANGANAN TRAFFICKING DI INDONESIA. Kaun Jurnal Ilmu Hukum, 21-31
- Monita, Y. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jurnal Ilmu Hukum, 160-171.
- NN. (1999) “Aliansi Global Menentang Perdagangan Perempuan: Standar HAM untuk Perlakuan terhadap Orang yang Diperdagangkan”, Jakarta: Gravta.
- Nur Iman. (2010) “Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan”. Jurnal Perempuan, No. 68
- Restu, L. P., & Yuniarti, I. S. (2013). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Kasus Human Trafficking di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 16(2), 211-225.
- Riyadh, F. O. (2022). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 6-13.
- Rumlah.S.(2021). UPAYA PENANGANAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA. Jurnal Pendidikan sejarah & sejarah FKIP Universitas jambi.1.91-97
- Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia (Jakarta: ICMC, 2003), hlm. 16.
- Ruslaini Sitompul, Belutpun Kalah Licin: Sulitnya Menjerat Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak, Jurnal Perempuan No. 51 Tahun 2007.
- Saifullah. (2001) “Efektivitas penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dikota makasar”, Jurnal Program Pascasarjana Universitas Hasanudin.
- Silalahi.J.(2018). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA).Jurnal Hukum.07.99-111
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 3.